

Pelatihan Implementasi Sistem Monitoring Laporan Keuangan Study Kasus Dinas Koperasi Kabupaten Jember

Taufiq Timur Warisaji, Ulya Anisatur Rosyidah*

Universitas Muhammadiyah Jember

taufiqtimur@unmuhjember.ac.id, ulyaanisatur@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif Desa Berbasis Kearifan Lokal Dan Kewirausahaan menjadi salahsatu program unggulan yang ingin dicapai dari pengabdian ini. Ekonomi kreatif adalah sebuah evolusi konsep berdasarkan aset kreatif yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki mengungkapkan, komunitas ekonomi kreatif (ekraf) berpotensi besar dalam perekonomian nasional. Guna meningkatkan produktivitasnya, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mendorong komunitas ekraf berkonsolidasi ke dalam format koperasi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember didalam menjalankan salahsatu fungsinya menemui beberapa kendala yaitu masih banyak dari koperasi yang belum mampu melaporkan Laporan Keuangan dan RAT dengan format yang sesuai. Pelatihan dan pembinaan Sistem Informasi Keuangan menjadi salahsatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut. Sistem Monitoring Laporan Keuangan ini akan digunakan Dinas Koperasi untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Laporan Keuangan dan Rapat Anggota Tahunan dari masing-masing koperasi yang menjadi binaannya. Hasil akhir dari pengabdian ini adalah berupa Modul Pelatihan Sistem Keuangan yang dapat digunakan untuk mempermudah koperasi dalam melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan format yang benar.

DOI: <https://doi.org/10.47134/comdev.v3i2.80>

*Correspondensi: Ulya Anisatur Rosyidah

Email: ulyaanisatur@unmuhjember.ac.id

Received: 26-05-2022

Accepted: 13-07-2022

Published: 23-07-2022



Journal of Community Development is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Copyright: © 2022 by the author (s).

Kata Kunci: dinas koperasi, ekonomi kreatif, koperasi, sistem informasi keuangan

Abstract

Development of the Village Creative Economy Industry Based on Local Wisdom and Entrepreneurship is one of the flagship programs to be achieved from this service. The creative economy is an evolution of concepts based on creative assets that can generate economic growth and development. Minister of Cooperatives and UKM, Teten Masduki revealed that the creative economy community (Ekraf) is most likely in the national economy. In order to increase their productivity, the Ministry of Cooperatives and UKM, encourages the creative economy community to consolidate into a format. The Department of Cooperatives and Micro Enterprises of Jember Regency in running one of the services encountered several obstacles, namely there were still many cooperatives that had not reported financial reports and RATs in accordance with standards. Financial Information System training and development is one of the efforts made to resolve these obstacles. This Financial Information System will be used by the Department of Cooperatives to carry out Monitoring and Evaluation of the implementation of the Financial Reports and RATs of each of the cooperatives under its guidance. The end result of this service is in the form of a Financial System Training Module that can be used to facilitate cooperatives in carrying out financial reporting in accordance with established standards.

Keywords : cooperative service, creative economy, cooperatives, financial information systems

I. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salahsatu badan usaha penopang ekonomi rakyat. Menurut data Penelitian yang dilakukan katadata.co.id, jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 127.124 unit dengan beragam jenis kegiatan dan tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah ini naik 3,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Koperasi terbanyak berada di Jawa Timur yakni sebanyak 22.464 unit atau sekitar 17,6% dari total koperasi. Selanjutnya, Jawa Barat dengan dengan 14.706 unit dan Jawa Tengah sebanyak 12. 190 unit. (BPS, 2021)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) menargetkan sektor koperasi bisa berkontribusi 5,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di tahun 2024. Saat ini, kontribusi koperasi baru 5% dari PDB. Peningkatan kontribusi PDB, telah memberikan indikasi adanya dampak terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta pemerataan pembangunan perekonomian nasional, namun jumlah masih dinilai sangat kecil.

Upaya pengembangan koperasi telah banyak dilakukan, Pemerintah selain telah melakukan reformasi, pada tahun 2020 pemerintah juga memulai memodernisasi koperasi (Siregar, 2019). Pelaku koperasi berupaya bertahan mengembangkan bisnis koperasi kearah koperasi berskala besar. Upaya lain juga dilakukan oleh gerakan koperasi untuk menyelenggarakan Kongres Koperasi Ketiga di Makasar tahun 2017 yang diprakarsai Kementerian Koperasi dan UKM, Dekopin dan Ikopin. Kongres menghasilkan berbagai kesepakatan, namun hingga kini implementasinya masih perlu diefektifkan, agar hasil kongres dapat memberikan warna perkembangan koperasi nasional. (Ikopin, 2021).

Hasil kongres tersebut ditindaklanjuti dengan pelimpahan kewenangan penanganan koperasi ke masing-masing Dinas Koperasi Daerah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jember merupakan induk dari puluhan koperasi yang ada di kabupaten jember. Tugas dari Diskopum adalah sebagai pelaksana tugas urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan.

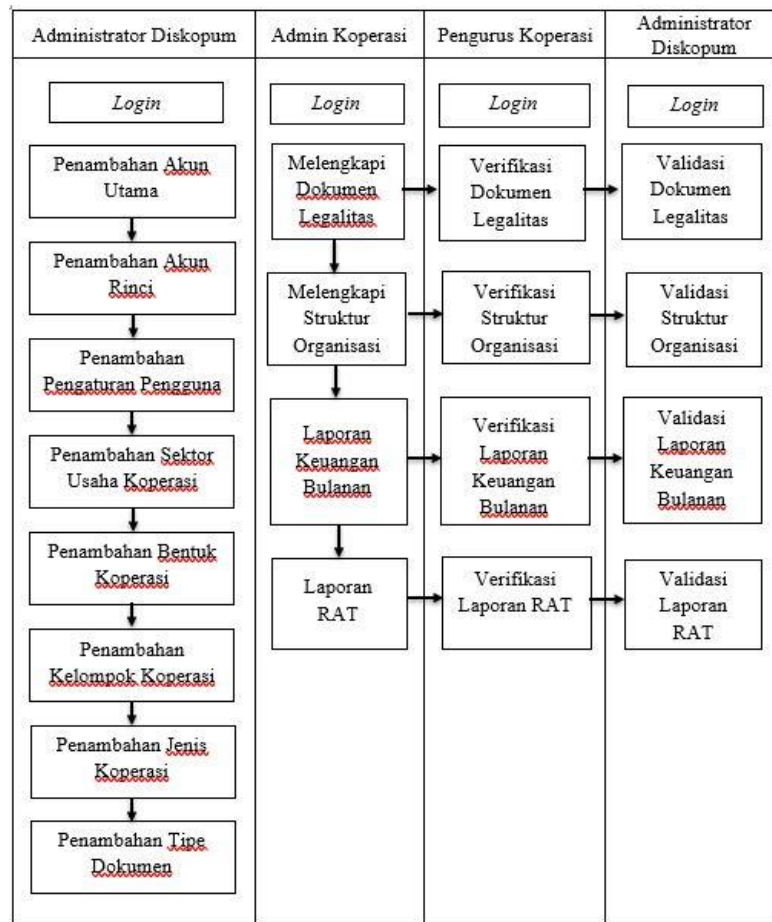
Beberapa masalah yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Kabupaten Jember dari belum meratanya kemampuan yang dimiliki bagian administrasi koperasi daerah adalah :

- a. Masih banyak koperasi didaerah yang belum mempunyai standar pelaporan yang sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
- b. Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan dalam RAT atau Rapat Akhir Tahunan dari masing-masing koperasi belum memenuhi prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.

Permasalahan diatas membuat monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas Koperasi sering mengalami keterlambatan pelaporan (Randi Prananto & Yulio, 2020). Akibatnya penyusunan laporan pertanggungjawaban dan perencanaan program kerja tahun berikutnya terkendala

II. METODE

Berikut adalah bagan arus pekerjaan system monitoring koperasi (*monitoring system flow*) Diskopum Kabupaten Jember:



Gambar 1. Monitoring System Flow

Sistem monitoring koperasi kabupaten jember merupakan sebuah sistem yang dapat digunakan oleh administrator diskopum, admin koperasi, dan pengurus koperasi Kabupaten Jember :

1. Administrator Diskopum
 Akun yang dimiliki oleh perusahaan terkait dengan pengaturan akun utama, akun rinci, pengaturan pengguna, sektor usaha koperasi, bentuk koperasi, kelompok koperasi, jenis koperasi, dan tipe dokumen. Melalui sistem *monitoring* koperasi Kabupaten Jember, akun ini juga dapat memvalidasi berkas yang sudah *approval* oleh pengurus koperasi.
2. Admin Koperasi
 Akun yang dimiliki oleh setiap admin di dalam perusahaan dari data yang telah didaftarkan oleh administrator diskopum. Pada akun ini, admin dapat melengkapi dokumen legalitas, melengkapi struktur organisasi dan menyusun laporan keuangan perusahaan.
3. Pengurus Koperasi
 Akun yang dapat dikelola secara langsung oleh perusahaan sebagai bentuk akun perpanjangan tangan (*level staff*) dari akun admin koperasi. Pada *level user/staff* ini memiliki kewenangan dasar yakni melakukan *approval* yang diajukan admin koperasi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember bermaksud membangun sistem tata kelola untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin pada seluruh koperasi yang ada di kabupaten Jember. Berdasarkan kebutuhan tersebut kami bermaksud untuk mengajukan penawaran pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan tujuan memebangun sistem informasi monitoring koperasi di Kabupaten Jember.

Lingkup pengembangan aplikasi sistem keuangan adalah membangun tatakelola administrasi laporan keuangan pada masing-masing Koperasi hingga menghasilkan laporan keuangan yang realtime, seperti neraca, laba/rugi, daftar saldo, daftar aset dan lainnya. Garis-garis besar pengembangan atau menu program aplikasi pada tahap ini adalah sebagai berikut :

- **Master Rekening**, Menu rekening digunakan untuk melakukan pengaturan rekening akuntansi, pada menu ini administrator dapat menambah, menghapus dan mengubah rekening sesuai kebutuhan. Rekening tersebut akan terbagi dalam 2 level rekening. Dimulai dengan level 1 yang paling atas, contohnya Aktiva, Kewajiban, Modal, Pendapatan dan Biaya. Dari level 1 tersebut akan tersusun secara hirarki level-level rekening yang ada dibawahnya hingga 2 level, sehingga masing-masing koperasi melalui tenaga administrasi keuangannya dapat menyusun dan menyesuaikan kebutuhan kode rekening akuntansi pada koperasi tersebut. Dengan tersedianya 2 level rekening akuntansi tersebut, akan menghasilkan catatan saldo yang lebih detail sesuai keperuntukannya. Dinas dan Koperasi juga lebih mudah untuk mendapatkan report sesuai kelompok atau level masing-masing rekening.
- **Laporan Saldo Bulanan**, menu ini adalah menu laporan saldo bulanan untuk masing-masing koperasi. Admin akan melaporkan saldo akhir dibulan kemarin saat bulan berjalan atau admin juga dapat melakukan entry total debit dan total kredit yang menghasilkan saldo bulanan, hal ini terus dilakukan sampai dengan perputaran tahunan.
- **Laba Rugi**, menu ini digunakan untuk melihat dan mencetak laba atau rugi yang diperoleh masing-masing koperasi baik bulan berjalan maupun setelah akhir transaksi per periode atau tahunan.
- **Neraca**, menu neraca disediakan untuk melihat laporan posisi keuangan yang memuat nilai masing-masing aktiva, kewajiban dan ekuitas. Menu ini akan dapat menghasilkan data yang realtime, selama neraca pada laba rugi telah dilakukan secara rutin bulanan.
- **Neraca Lajur**, menu ini disediakan untuk menampilkan saldo rekening masing-masing bulan dalam satu tahun, baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

Kegiatan pelatihan diikuti 120 koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Jember dengan peserta sebanyak 240 orang yang terdiri dari perwakilan pengurus dan administrator. Pelaksanaan pelatihan di PLUT-K UMKM Kabupaten Jember.



Gambar 2. Kegiatan Pelatihan 1



Gambar 3. Kegiatan Pelatihan 2

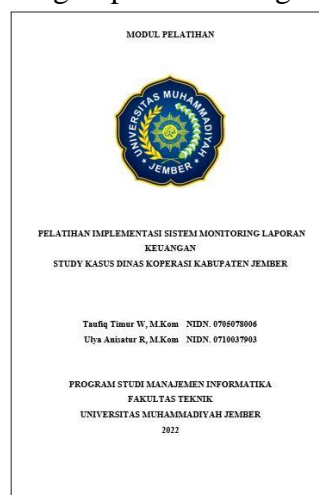


Gambar 4. Kegiatan Pelatihan 3



Gambar 5. Kegiatan Pelatihan 4

Didalam kegiatan tersebut, peserta diberikan modul yang memudahkan proses praktek langsung didalam penggunaan aplikasi Sistem Monitoring Laporan Keuangan sebagai berikut :



Gambar 6. Cover Modul Pelatihan

IV. KESIMPULAN

Kegiatan Pelatihan Sistem Monitoring Laporan Keuangan yang dilakukan melalui kerjasama dengan Diskopum Kabupaten Jember dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 240 orang yang berasal dari 120 koperasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Jember. Aplikasi yang digunakan menggunakan tiga user dengan kewenangan yang berbeda ini memberikan kemudahan bagi pihak pengguna dalam memberikan laporan perkembangan organisasi mereka kepada Diskopum. Laporan ini digunakan Diskopum dalam membuat Perancangan Rencana Strategis sesuai dengan kondisi koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Jember.

Pelaporan yang dihasilkan dari modul ini sudah sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Begitu juga permasalahan mengenai Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan dalam RAT atau Rapat Akhir Tahunan dari masing-masing koperasi sudah memenuhi prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima kasih disampaikan untuk kerjasama yang baik dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember serta peserta yang sudah mewakili koperasi – koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

BPS, 2021. Statistik Koperasi Simpan Pinjam. In: Jakarta: Badan Pusat Statistic, p. 25.

Ikopin, 2021. [Online]

Available at: <https://ikopin.ac.id/staging/2021/07/06/koperasi-kini-dan-harapan-kedepan/>

Republika, 2021. [Online].

Prananto, Randi, Penerapan RAT secara elektronik. 2020

Siregar, A, Dampak Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah terhadap Perkembangan Koperasi di Indonesia, Berkala Ilmiah, 2019

Sudarwanto, S., 2019. *Koperasi di Era Ekonomi Kreatif*. Yogyakarta: Thafa Media.